

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah negara yang berkembang sejak kemerdekaan 17 Agustus 1945 hingga tahun ini, kemerdekaan tersebut tidak luput dari perjuangan para pahlawan, rakyat dan pemuda-pemudi dari berbagai wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Pasca kemerdekaan presiden Ir. Soekarno menjalankan pemerintahan dengan sistem presidensial dan parlementer. Namun sistem tersebut hanya bertahan selama empat tahun dikarenakan pada 23 Agustus hingga 2 November 1949 dalam rapat konferensi meja bundar di Deen Haag dikeluarkan keputusan yang mengharuskan Indonesia mengubah sistem presidensial dan parlementer menjadi serikat dalam bentuk Republik Indonesia Serikat (RIS)¹. Tidak lebih dari satu tahun, Presiden Soekarno memutuskan membubarkan Republik Indonesia Serikat dan mengembalikan sistem pemerintahan menjadi demokrasi parlementer². Masa kepemimpinan Soekarno yang menjadi awal dalam sejarah pemerintahan Indonesia sejak tahun 1945 hingga 1965 dikenal dengan masa Orde Lama.

Kudeta 1965 mengakhiri masa kepemimpinan Presiden Ir. Soekarno dengan digantikan oleh presiden baru yaitu Soeharto. Sebagai presiden baru, Soeharto membangun Orde Baru sebagai pembeda antara pemerintahannya dan Soekarno.

¹ M C Ricklefs, *Sejarah Indonesia modern 1200-2004*, tjh. Satrio Wahono, dkk, (Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2005), hlm. 466

² Ibid, hlm. 470

Masa Orde baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto memiliki berbagai prestasi yang dikenang dalam sejarah, diantara pemerintahan Soeharto dapat menyeimbangkan ekonomi³.

Program menyeimbangkan ekonomi pada masa Orde Baru dilaksanakan berdasarkan ketetapan MPRS no. 23 tahun 1966, berikut didalamnya mengharuskan perbaikan atas persoalan ekonomi rakyat diatas segala persoalan nasional lainnya, berlaku pula pada persoalan politik. Oleh karenanya pemerintah mulai merancang kebijakan-kebijakan politik dalam dan luar negeri dengan tujuan utama agar dapat membantu perbaikan ekonomi rakyat. Salah satu perubahan yang dilakukan pemerintah Orde Baru adalah pembaharuan landasan ekonomi dari ekonomi terpimpin menjadi demokrasi ekonomi sesuai pasal 33 UUD 1945. Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa defenisi demokrasi ekonomi adalah sistem produksi yang dilakukan oleh masyarakat dan untuk masyarakat itu sendiri.

Upaya menyeimbangkan ekonomi pada masa Orde Baru dimulai dengan melakukan tindakan dalam upaya pembayaran utang luar negeri hingga berhasil membangun Badan koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Tidak hanya berhenti disitu, Pemerintah Orde Baru melanjutkan upaya penyeimbangan ekonomi melalui pembangunan. Tahun 1969 pemerintah memulai rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) untuk pertama kalinya. Rencana pembangunan terdiri dari pembangunan jangka pendek maupun panjang yang telah ditetapkan oleh MPRS sebagai bagian atau aspek daripada Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN).

³ M C Ricklefs, *Sejarah Indonesia modern 1200-2004*, tjh. Satrio Wahono, dkk, (Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2005), hlm. 558

Pembangunan Indonesia digagaskan berdasarkan dasar Pancasila sebagai dasar filsafat bangsa, UUD 1945 sebagai konstitusi Indonesia, garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN), Pembangunan Lima Tahun (PELITA), dan kebijakan-kebijakan Departemen⁴. Pembangunan di Masa Orde Baru diupayakan dalam berbagai bidang, seperti pertanian, transformasi, pendidikan dan salah satu diantaranya adalah otonomi daerah atau desa.

Pada Repelita II Pemerintah mulai menetapkan kebijaksanaan dimana seluruh desa di Indonesia akan dibangun secara bertahap menjadi Desa Swasembada, yaitu Desa Maju dan Berkembang. Desa Swasembada adalah tujuan pembangunan desa Indonesia dengan standar tertentu, yaitu sebuah desa harus memiliki struktur organisasi baik dalam lembaga pemerintah desa, lembaga sosial kemasyarakatan, lembaga ekonomi dan lain sebagainya. Peningkatan pembangunan desa senantiasa dilakukan sehingga pada Repelita IV telah menghasilkan Desa Swasembada sebesar 46% dengan presentasi peningkatan rata-rata 6%. Oleh karena itu demi meningkatkan pembangunan desa di setiap wilayah Indonesia, pada Pelita V ditetapkan target yang harus dicapai dalam pembangunan desa yaitu sebanyak 7%⁵.

Target dalam pelaksanaan Pelita V tidak hanya mendapatkan kenaikan peningkatan sebanyak 1% dari sebelumnya tetapi juga memenuhi standar pembangunan desa yang telah ditetapkan oleh pemerintah Orde Baru dalam UU no. 5 tahun 1979. Pembangunan desa tersebut tidak hanya ditujukan pada wilayah

⁴ Amri Marzali, *Atropologi dan Pembangunan Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 47

⁵ Raja Inal Siregar, *Marsipature Hutana Be*, (Medan: Haria Analisa Medan, 1990), hlm. 51

ibukota Negara Indonesia Kota Jakarta tetapi untuk keseluruhan wilayah yang telah terbagi menjadi dalam tiga tingkatan.

Daerah tingkat tiga merupakan daerah yang mempunyai otonomi untuk mengurus urusan rumah tangganya sebagaimana yang telah ditetapkan dalam UU Republik Indonesia No. 18 Tahun 1965 tentang pokok-pokok pemerintah daerah. Namun sejak tahun 1969, telah dikeluarkan Undang-undang yang menyatakan tidak berlakunya berbagai undang-undang peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Pernyataan tersebut terdapat pada UU Republik Indonesia No. 6 Tahun 1969. Dengan demikian, UU mengenai pokok-pokok pemerintah daerah sebelumnya tidak lagi berlaku, sehingga pada tahun 1974 dikeluarkan undang-undang mengenai pokok-pokok pemerintah daerah dalam UU No. 5 Tahun 1974. Penyempurnaan undang-undang mengenai pokok-pokok pemerintah daerah kembali dilakukan pada 1979. Demikian pembangunan desa pada masa Orde Baru telah menjadikan UU No. 5 Tahun 1979 sebagai dasar pokok pemerintah Desa dalam kegiatan pembangunan daerah.

Daerah tingkat tiga atau pedesaan menjadi sasaran pembangunan dikarenakan tingkat pemaharuan baik dalam tingkat pendidikan, kesehatan, kebersihan, teknologi, ekonomi dan sebagainya. Dengan demikian pemerintah mengeluarkan kebijakan pembangunan daerah pedesaan yang akan dikoordinator oleh pemerintah daerah tingkat satu yaitu ibukota provinsi yang menjadi jembatan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Dibawah ketetapan UU No. 5 Tahun 1979 provinsi-provinsi di Indonesia yang merupakan daerah otonomi tingkat satu telah menerapkan ketetapan dalam undang-undang, dengan demikian

Indonesia pada kala itu yang mempunyai 27 provinsi telah mulai melaksanakan pembangunan daerah pedesaan.

Provinsi Sumatra Utara adalah salah satu dari provinsi-provinsi di Indonesia yang merupakan pemekaran dari Provinsi Sumatra yang ditetapkan sebagai daerah otonomi dalam peraturan pemerintah No. 8 Tahun 1947. Sama halnya dengan provinsi lain di Indonesia, Sumatra Utara telah mengupayakan jalannya program pembangunan daerah khususnya pedesaan, sebab keberadaannya menjadi mata rantai sejarah lokal yang mencirikan karakter kuat dalam pembentukan negara kebangsaan (*nation state*)⁶. Dalam sejarahnya Sumatra Utara menjadi salah satu provinsi tempat terjadinya peristiwa-peristiwa yang memberi dampak besar bagi pemerintahan Indonesia pasca kemerdekaan, salah satunya adalah peperangan di Medan Area⁷.

Provinsi Sumatra Utara (Sumut) meliputi daerah Sumatra Timur, Tanah Karo, Simalungun, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan dan Nias. Wilayah seluas 70.787 kilometer persegi dengan luas 3,72 dari tanah Indonesia, Sumut kaya akan bahan tambang dalam peranannya dalam jalur sutera⁸. Salah satu keindahan alam milik provinsi adalah Danau Toba, danau terbesar di Indonesia.

Pembangunan desa yang dijalankan oleh pemerintah provinsi Sumatra Utara dilakukan di beberapa desa yang kebanyakan ditempati oleh dua suku yang

⁶ Muhammad Tok Wan Haria, *Sumatra Utara Bergelora: Kisah-kisah Nyata Perang Kemerdekaan RI*, (Medan: Yayasan pelestarian Fakta Perjuangan Kemerdekaan RI, 1999), hlm. 5

⁷ Muhammad Tok Wan Haria. *Belanda Gagal Rebut P. Brandan*, (Medan: Yayasan Pelestarian Fakta Perjuangan Kemerdekaan RI, 1997), hlm. 16.

⁸ *Citra Sumatra Utara dalam Arsip*, (Jakarta: Arsip Nasional, 2004), hlm. 7-8

mendominasi populasi penduduk di wilayah provinsi tersebut yaitu Suku Melayu dan Batak. Riset tahun 1876 dikatakan populasi di Provinsi Sumatra Utara terdaftar 11.963 Suku Melayu, 20.060 Suku Batak (Kebanyakan Suku Batak Karo) dan 4.543 Cina dan lainnya⁹. Secara antropologi, daerah sumut terdiri dari dua suku, yaitu Suku Batak dan Suku Melayu. Masyarakat Suku Batak menuruti garis patrilineal (garis bapak). Sedangkan Masyarakat Suku Melayu meski tidak memiliki marga yang mewakili atau menjadi simbol sukunya, tetapi mereka sangat bangga dengan kebudayaannya. Kebudayaan melayu mengajarkan agar setiap orang memiliki perasaan belas kasihan dan bersimpati terhadap mereka yang berada lebih rendah dalam strata sosial, saling membantu satu sama lain, serta bersikap saling menghormati kepada orang-orang yang derajatnya lebih tinggi¹⁰.

Kedua kebudayaan yang mendominasi wilayah Provinsi Sumatra Utara telah tercatat dalam sejarah panjang nusantara, diantaranya seperti Kesultanan Deli yang mendominasi Suku Melayu dan Kerajaan Sisingamangaraja untuk Suku Batak. Diketahui bahwa letak Kesultanan Deli memiliki jarak yang cukup dekat dengan ibukota provinsi sehingga wilayah tersebut banyak dihuni oleh masyarakat melayu, namun walau demikian masyarakat batak pula telah menempati beberapa wilayah di ibukota sehingga kedua suku bersitegang untuk mendapatkan kekuasaan atas tanah Medan yang sekarang ini menjadi ibukota Provinsi Sumatra Utara¹¹.

⁹ Anthony Reid, *The Blood of the People: Revolution and the End of Traditional Rule in Northern Sumatra*, (Singapura: NUS Press Pte Ltd, 2014), hlm. 40-41

¹⁰ *Citra Sumatra Utara dalam Arsip*, (Jakarta: Arsip Nasional, 2004), hlm. 10

¹¹ Data Sensus dan Statistik Tahunan Provinsi Sumatera Utara, *Sumatera Utara Dalam Angka 1984*, (Perwakilan BPS Kantor Statistik Provinsi Sumatera Utara: Medan, 1986), hlm. 34.

Perselisihan tersebut tidak hanya diakibatkan perbedaan kebudayaan tetapi juga perbedaan watak dan keyakinan.

Umumnya Provinsi Sumatra Utara memiliki mayoritas penduduk bersuku batak. Dalam masyarakat Batak (Toba, Karo, Simalungun, Pakpak/Dairi, dan Ankola Mandailing) dipisahkan oleh golongan *Dalihan Na Tolu* (fungsional) berupa: *dongan sabutuha*, *boru*, dan *hula-hula*. Sedangkan masyarakat Melayu digolongkan dalam *puang*, *anak beru*, dan *ahli famili*. Terakhir masyarakat Nias menjunjung tinggi ikatan keluarga besar yang berasal dari satu leluhurnya yang disebut *mado-mado*¹². Kepercayaan dalam Masyarakat Batak terbagi menjadi beberapa bagian ada yang menganut agama kuno (*Parmalim*), Kristen, dan Islam.

Kepercayaan agama yang masing-masing dianut oleh Masyarakat Batak menjadi salah satu identitas yang mencirikan ciri suku Batak yang terbagi menjadi beberapa bagian. Diantaranya agama kuno (*Parmalim*) mencirikan Suku Batak Toba, sedangkan Kristen mencirikan Suku Batak Karo, Pak-pak, Serta yang terakhir adalah Islam mencirikan Suku Batak Angkola Mandailing.

Tak hanya Batak Angkola Mandailing, tetapi seluruh Suku Batak adalah suku yang paling banyak menduduki Provinsi Sumatra Utara, suku yang dikenal dengan sifatnya yang keras kepala dan kasar¹³. Sifat itu tak hanya menunjukkan keberanian dalam diri mereka, tetapi juga memperlihatkan ketad kuat dalam mencapai tujuannya.

¹² Citra Sumatra Utara dalam Arsip, (Jakarta: Arsip Nasional, 2004), hlm. 10-11

¹³ Bungaran Antonius Simanjuntak, *Karakter Batak Masa Lalu, Kini dan Masa Depan*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015), hlm. 6

Gerakan *Marsipature Hutana Be* disingkat menjadi GPDT-MHB (Gerakan Pembangunan Desa Terpadu- *Marsipature Hutana Be*) adalah salah satu gerakan sosial yang beroperasi untuk membantu program pembangunan otonomi daerah atau singkatnya pembangunan desa. Nama tersebut diangkat dari bahasa Batak (Angkola Mandailing), gerakan ini dicetuskan pada tahun 1989 sebagai program pertamanya setelah menjabat sebagai Gubernur KDH Tingkat 1 Sumatra Utara sejak 13 Juni 1988¹⁴. Gerakan Marsipature Hutana Be adalah sebuah doktrin, ajakan untuk memperbaiki atau membangun desa di wilayah Provinsi Sumatra Utara. Adapun target utama atau sasaran dari gerakan ini adalah perantau yang ada di luar wilayah provinsi¹⁵.

Gerakan Pembangunan Desa Terpadu-Marsipature Hutana Be (GPDT-MHB) berlangsung secara terprogram dibawah kepemimpinan Raja Inal Siregar selama 10 tahun yaitu selama dua periode beliau menjabat menjadi Gubernur Provinsi Sumatra Utara.

Pembangunan desa adalah salah satu program penting dalam Pemerintahan Orde Baru, penyupayaannya dilakukan hampir diseluruh wilayah Indonesia. Dibawah kepemimpinan Presiden Soeharto, pembangunan-pembangunan dilakukan dengan tujuan menyeimbangkan ekonomi Negara Indonesia. Pembangunan menjadi salah satu simbol dalam pemerintahan Orde Baru, dengan demikian penyusun mengangkat topik pembangunan desa sebagai salah satu hal

¹⁴ Raja Inal Siregar, *Marsipature Hutana Be*, (Medan: Haria Analisa Medan, 1990), hlm. 23

¹⁵ Imam El Islamy, "Strategi Komunikasi Pembangunan Marsipature Hutana Be (Parsipatif) Masyarakat Desa Doulu Kabupaten Karo Provinsi Sumatra Utara", *Komunikasi Islamika: Jurnal Ilmu Komunikasi dan Kajian Islam*, vol. 06, no. 02, Desember 2019, hlm. 161.

yang identik dengan zaman Orde Baru. Penyusun mengangkat salah satu program pembangunan desa di Provinsi Sumatra Utara yang bernama Gerakan Marsipature Hutana Be atau yang disingkat dengan GPDT-MHB sebagai topik permasalahan. Secara terinci, gerakan tersebut diangkat sebagai salah satu program pembangunan desa yang dijalankan dalam program kerja Gubernur Raja Inal Siregar yang muncul pertama kali pada tahun 1989.

B. Rumusan Masalah

Dengan mengusul masalah yang terdapat dalam latar belakang, terdapat permasalahan pokok yang berkaitan dengan tema yang dibahas. Hal tersebut melahirkan perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pembentukan Marsipature Hutana Be di Provinsi Sumatra Utara?
2. Bagaimana kontribusi Marsipature Hutana Be dalam pembangunan desa di Provinsi Sumatra Utara?

C. Tujuan

Secara akademi tujuan penelitian ini adalah untuk membuktikan danya Gerakan Marsipature Hutana Be di Provinsi Sumatra Utara serta pengaruhnya terhadap pembangunan pedesaan Provinsi Sumatra Utara. Secara lebih rinci, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Memahami pembentukan Marsipature Hutana Be di Provinsi Sumatra Utara.
2. Memahami kontribusi *Marsipature Hutana Be* dalam pembangunan desa di Provinsi Sumatra Utara.

D. Kajian Pustaka

Dalam penyusunan penelitian yang berjudul “Kontribusi *Marsipature Hutana Be* GPDT-MHB dalam Pembangunan Pedesaan Provinsi Sumatra Utara 1989-1998”, terdapat penelitian sebelumnya baik berupa jurnal, skripsi, tesis, disertasi dan buku yang sebagai penelitian terdahulu yang dijadikan bahan perbandingan untuk menuliskan penelitian ini. Diantara hasil penelitian-penelitian itu adalah:

Pertama, Buku MHB *Marsipature Hutana Be: Pembangunan Desa Menuju Otonomi Daerah* karya Jhon Tafbu Ritonga yang diterbitkan pada tahun 2000 oleh Penerbit Pustaka Quantum di Jakarta. Buku ini merupakan hasil penelitian dari Gerakan Pembangunan Desa Terpadu-*Marsipature Hutana Be* (GPDT-MHB) sebagai salah satu pembangunan otonomi daerah. Dalam buku ini dijelaskan bagaimana prinsip gerakan MHB dapat memengaruhi pembangunan di Provinsi Sumatra Utara. Gerakan ini juga tidak hanya berupa hasil kerjasama pemerintah dengan penduduk setempat tetapi juga menyertakan aktivis-aktivis yang sedang merantau di daerah lain yang dulunya tinggal atau menetap di Sumatra Utara atau memiliki hubungan historis dengan provinsi ini. buku ini adalah penelitian sosial yang mengaitkan Gerakan MHB (*Marsipature Hutana Be*) dengan pembangunan otonomi daerah. Penelitian ini menggunakan ilmu sosial sebagai ilmu utama, kaidah penelitian dan teori dalam memecahkan permasalahan dalam penelitian tersebut.

Kedua, Tesis berjudul *Analisis Dampak Program Kebijakan Gerakan Marsipature Hutana Be di Provinsi Sumatra Utara (Studi Kasus di Kabupaten Dati II Karo)* oleh Muhammad Yusuf dan Dr. Agus Dwiyanto yang terbit pada tahun 1998 Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Tesis penelitian ini memiliki lokasi yaitu Kabupaten Dati II Karo sebagai objek lokasi penelitian.

Ketiga, Skripsi berjudul *Analisis Pendekatan “Marsipature Hutana Be” Dalam Pembangunan Wilayah Pedesaan: (Studi Kasus Gerakan “Marsipature Hutana Be” di Kecamatan Balige, Tapanuli Utara)* oleh Alfred Marbun yang terbit pada tahun 1999 Universitas Andalas Padang Sumatra Barat. Skripsi hasil penelitian ini memiliki kesamaan dengan tesis sebelumnya, yaitu studi kasus tentang Gerakan Pembangunan Desa Terpadu-*Marsipature Hutana Be* (DPDT-MHB) namun dibedakan oleh lokasi penelitian, dimana lokasi penelitian skripsi ini adalah beralamatkan di Kecamatan Balige, Tapanuli Utara.

Keempat, Skripsi *Peranserta Masyarakat dalam Gerak Pembangunan Desa Terpadu “Marsipature Hutana Be” Studi Kasus Desa Silalagi II, Kecamatan Sumbul, Kabupaten Dati II Dairi, Provinsi Dati I Sumatra Utara* oleh Dewi Rotua Silalahi tahun 2010, Institusi Pertanian Bogor Jawa Barat. Skripsi ini mengangkat peranserta masyarakat Desa Silalagi II dalam pengoperasian Gerakan Marsipature Hutana Be selaku gerakan yang dikembangkan sebagai strategi pembangunan pedesaan Provinsi DT I Sumatra Utara. Gerakan tersebut dilandasi oleh pendekatan nilai dan norma masyarakat yang telah berakar dalam kehidupan masyarakat. Dimana tujuannya adalah untuk meningkatkan peranserta masyarakat dalam

membangun desa, terutama masyarakat yang merantau. Oleh karena itu Desa Silalahi II direncanakan sebagai objek pariwisata.

Berdasarkan kajian pustaka tersebut, rencana penelitian dengan tema “Kontribusi Marsipature Hutana Be GPDT-MHB dalam Pembangunan Pedesaan di Provinsi Sumatra Utara 1989-1998”. Setelah peninjauan, penyusun mengetahui bahwa telah terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang mengkaji Gerakan Marsipature Hutana Be, namun perbedaannya adalah dalam penelitian ini pembahasannya lebih condong kepada sejarah gerakan tersebut dengan menggunakan metode penelitian sejarah sebagai langkah dalam penelitian yang sebelumnya belum pernah dilakukan sebelumnya. Dalam penelitian ini pula akan diuraikan secara lebih spesifik mengenai kontribusi pembangunan desa di wilayah Provinsi Sumatra Utara khususnya Gerakan *Marsipature Hutana Be* atau yang lebih dikenal dengan singkatan GPDT-MHB. Dalam penelitian ini penyusun lebih menekankan kontribusi *Marsipature Hutana Be* dalam pembangunan pedesaan di wilayah Provinsi Sumatra Utara sejak tahun 1989 hingga 1998.

Dapat dilihat pula perbedaan antara keempat penelitian diatas dengan penelitian ini, dimana penelitian-penelitian sebelumnya memakai kajian ilmu selain sejarah yaitu kajian ilmu sosial dan administrasi negara. Dalam penelitian ini penyusun memakai kajian historis berdasarkan teori-teori yang ada dalam ilmu sejarah.

Penelitian-penelitian sebelumnya diketahui adalah kajian yang menguraikan program Gerakan *Marsipature Hutana Be* sebagai sebuah gerakan

sosial yang berkecimpung dalam pembangunan pedesaan di wilayah Provinsi Sumatra Utara tanpa mengaitkan gerakan tersebut dengan budaya Islam yang telah berkembang dalam masyarakat Sumatra Utara sejak masuknya Islam ke Nusantara. Penelitian-penelitian sebelumnya pula dijadikan penyusun sebagai rujukan dan sumber data yang akan membantu dalam penyusunan penelitian ini.

Dengan demikian penyusun memutuskan mengangkat hubungan antara Gerakan *Marsipature Hutana Be* dengan budaya Islam yang terdapat dalam kehidupan sosial masyarakat Sumatra Utara dalam penelitian ini. Poin tersebut dijadikan sebagai pembaharuan dalam penelitian ini serta untuk melengkapi penelitian-penelitian sebelumnya. Demikian, penelitian ini dirasa layak untuk dikaji lebih lanjut dalam pandangan ilmu sejarah karena belum ada yang membahasnya, menarik, penting untuk diteliti serta dapat memperkaya sumber sejarah lokal di Indonesia.

E. Metode Penelitian

Metode mempunyai arti sebagai cara prosedural untuk meneliti sesuatu dalam sebuah sistem literatur yang sudah direncanakan. Adapun di dalamnya terdapat beberapa syarat yang harus dipatuhi oleh peneliti untuk menjadikan penelitian tersebut dalam bentuk prosedur yang sistematis. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian sejarah. Dimana metodologi sejarah adalah prosedur yang dimana medel atau hipotesis tersebut harus dilakukan oleh para sejarawan dalam penelitian dan penyusunan sejarah¹⁶. Dalam metode sejarah

¹⁶ M Dien Majid dan Johan Wahyudi, *Ilmu Sejarah: Sebuah Pengantar* (Jakarta: Kencana, 2014), 217–30.

atau metode historis terdapat langkah-langkah yang harus dilakukan, diantaranya adalah:

1. Heuristik

Heuristik adalah sebagai (*to find*) yang mempunyai maksud lebih dari hanya menemukan, namun juga bertujuan mencari dahulu baru menemukan. Yang mana fungsi dari metode ini adalah sebagai proses mencari untuk menemukan sejarah¹⁷. Pengerian lainnya adalah mencari bukti-bukti atau bahan-bahan sumber baik sumber primer maupun sekunder yang diperlukan dalam penelitian¹⁸. Adapun sumber dalam penelitian sejarah ada beberapa jenis yaitu¹⁹: dokumen tertulis, artefak, sumber lisan, sumber kuantitatif.

Sumber yang digunakan dalam penelitian ini secara garis besar dikategorikan dalam dua bagian yaitu sumber primer dan sekunder yang diperoleh dari hasil studi kepustakaan, *networking*, observasi secara langsung dan wawancara.

Langkah awal dalam metode ini, penyusun melakukan penelusuran informasi mengenai pembangunan desa di Sumatra Utara melalui jaringan internet. Kemudian setelah mendapat beberapa informasi bahwa pada tahun 1989 terdapat sebuah gerakan yang dicetuskan dalam program pemerintah Gubernur Raja Inal Siregar selaku Gubernur Provinsi Sumatra Utara yang bernama Gerakan Marsipature Hutana Be atau yang disingkat dengan GPDT-MHB (Gerakan Pembangunan Desa Terpadu-Marsipature Hutana Be). Langkah

¹⁷ Aam Abdillah, *Pengantar Ilmu Sejarah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012).

¹⁸ Wasino dan Endah Sri Hartatik, *Metode Penelitian Sejarah: Dari Riset Hingga Penelitian* (Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2018).

¹⁹ Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah* (Yogyakarta: Penerbit Tiara Wacana, 2018).

selanjutnya adalah pencarian sumber di perpustakaan-perpustakaan. Di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Pemko Medan terdapat Sumber berupa Arsip “Naskah Rancangan Pola Dasar Pembangunan Daerah Propsi” oleh Panitia Perumus DPRD Prop Dati I SU, dan Arsip Berkas Kumpulan Surat Keputusan Gubernur tentang Pengesahan Proyek Pembangunan Daerah TK I Sumatra Utara TA 1988/1989. Terdapat pula buku yang berjudul “Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Kota Madya Medan 1989” dan beberapa buku lainnya yang berkaitan dengan tema penelitian, di Perpustakaan dan Arsip Provinsi Sumatra Utara terdapat pula sumber primer berupa buku Marsipature Hutana Be. Selanjutnya di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia terdapat buku berjudul “Gerakan Pembangunan Desa Terpadu-Marsipature Hutana Be Suatu Upaya Terobosan Mencegah Urbanisasi: Pokok-pokok Pikiran Gubernur KDH TK. I Sumatera Utara Raja Inal Siregar dalam Himpunan Pidato dari Bulan Oktober 1989 sampai dengan Bulan Maret 1990”. Selanjutnya di Perpustakaan Universitas Sumatra Utara (USU) terdapat sumber sekunder berupa buku dengan judul “Marsipature Hutana Be: Pembangunan Desa Menuju Otonomi Daerah”. Adapun sumber-sumber yang telah diklasifikasikan, diantaranya adalah:

a. Sumber Primer Tertulis (Arsip, Dokumen, Berkas, dan Buku)

1. Data Sensus dan Statistik Indonesia dalam Angka 1989 (*Statistical year Book of Indonesia 1989*). Biro Pusat Statistik Indonesia: Jakarta. Diterbitkan pada Tahun 1990.

2. Data Sensus dan Statistik Indonesia dalam Angka 1998 (*Statistical year Book of Indonesia 1998*). Badan Pusat Statistik Indonesia: Jakarta. Diterbitkan pada Tahun 1999.
3. Data Sensus dan Statistik Tahunan: Sumatera Utara Dalam Angka 1984. Perwakilan BPS Kantor Statistik Provinsi Sumatera Utara: Medan. Diterbitkan pada Tahun 1986.
4. Data Sensus dan Statistik Tahunan: Sumatera Utara Dalam Angka 1988. Perwakilan BPS Kantor Statistik Provinsi Sumatera Utara: Medan. Diterbitkan pada Tahun 1989.
5. Data Sensus dan Statistik Tahunan: Sumatera Utara Dalam Angka 1995. Perwakilan BPS Kantor Statistik Provinsi Sumatera Utara: Medan. Diterbitkan pada Tahun 1996.
6. Pemerintah Daerah Sumatra Utara. 1976. *Sumatera Utara Membangun*. Medan: Pemerintah Daerah Sumatra Utara.
7. Naskah Rancangan Pola Dasar Pembangunan Daerah Propsi oleh panitia Perumus DPRD Prop Dati I SU
8. Berkas Kumpulan Surat Keputusan Gubernur tentang Pengesahan Proyek Pembangunan Daerah TK I Sumatra Utara TA 1988/1989
9. Raja Inal Siregar, *Marsipature Hutana*, Medan: Harian Analisa, 1990.
10. Raja Inal Siregar, *Gerakan Pembangunan Desa Terpadu-Marsipature Hutana Be Suatu Upaya Terobosan Mencegah Urbanisasi: Pokok-pokok Pikiran Gubernur KDH TK. I Sumatera*

Utara Raja Inal Siregar dalam Himpunan Pidato dari Bulan Oktober 1989 sampai dengan Bulan Maret 1990, Medan: Biro Humas Setwilda Pemerintah daerah Tk. I Sumatra Utara, 1990.

11. *Terobosan Membangun Desa: Marsipature Hutana Be*, Medan: Biro Humas Pemda Tk. I Sumatra Utara, 1993.
12. *Sejarah Pengaruh Pelita terhadap Kehidupan Masyarakat Pedesaan di Daerah Sumatra Utara*. Medan: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1983.
13. Undang-Undang (UU) No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah , JDIH BPK RI Database Peraturan.
14. *Arsip Citra Sumatra Utara dalam Arsip*, Jakarta: Arsip Nasional, 2004.
15. Muhammad Tok Wan haria, *Gubernur Sumatra dan Para Gubernur Sumatra Utara*, Medan: Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Sumatra Utara, 2006.

b. Sumber Primer Visual (Foto atau Dokumen)

1. Mayjen TNI Raja Inal Siregar (Panglima Divisi Siliwangi ke XVI).
2. Foto Raja Inal Siregar setelah menjadi Gubernur.
3. Peta Sumatra Utara sejak tahun 1984.
4. Foto Basyral Hamidy Harahap, penulis buku “Orientasi Nilai-nilai Budaya Batak: Suatu Pendekatan terhadap Prilaku Batak Toba Angkola Mandailing”.

5. Foto Contoh Fotomat Daftar Jenis Proyek-projek GPDT-Marsipature Hutanabe Kabupaten Daerah Tingkat II.
6. Foto Kondisi Ruang Belajar di Sekolah Sumatra Utara.
7. Foto Kondisi Ekonomi di Pasar Masyarakat Sumatra Utara.
8. Foto Pembangunan Gerakan Marsipature Hutana Be di Provinsi Sumatra Utara.
9. Foto Raja Inal Siregar dalam Merancang Perluasan Pembangunan Gedung Gubernur
10. Foto Gubernur Raja Inal Siregar Bersama Presiden Soeharto

c. Sumber Sekunder

1. Data Sensus dan Statistik Indonesia dalam Angka 1988 (*Statistical year Book of Indonesia 1988*). Badan Pusat Statistik Indonesia: Jakarta. Diterbitkan pada Tahun 1989.
2. Data Sensus dan Statistik Indonesia dalam Angka 1985 (*Statistical year Book of Indonesia 1985*). Badan Pusat Statistik Indonesia: Jakarta. Diterbitkan pada Tahun 1986.
3. Data Sensus dan Statistik Indonesia dalam Angka 1990 (*Statistical year Book of Indonesia 1990*). Badan Pusat Statistik Indonesia: Jakarta. Diterbitkan pada Tahun 1991.
4. Data Sensus dan Statistik Indonesia dalam Angka 1995 (*Statistical year Book of Indonesia 1995*). Badan Pusat Statistik Indonesia: Jakarta. Diterbitkan pada Tahun 1995.

5. Undang-Undang (UU) No. 6 Tahun 1969 Tentang Pernyataan Tidak berlakunya berbagai Undang-undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang, JDIH BPK RI Database Peraturan.
6. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 1947 Tentang Pemerintahan di Sumatra, Sebagai Daerah Otonomi, JDIH BPK RI Database Peraturan.
7. Undang-Undang (UU) No. 19 Tahun 1965 Tentang Desapraja sebagai Bentuk Peralihan untuk Mempercepat Terwujudnya Daerah Tingkat II di Seluruh Wilayah Republik Indonesia, JDIH BPK RI Database Peraturan.
8. Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara Republik Indonesia (MPRS) No. 23 Tahun 1966 Tentang Pembaharuan Kebedjaksanaan Landasan Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan, Kementrian Keuangan RI.
9. Undang-Undang (UU) No. 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, JDIH BPK RI Database Peraturan.
10. Undang-Undang (UU) No. 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa, JDIH BPK RI Database Peraturan.
11. Badan Pembina Corps Siliwangi Jakarta Raya. *Album Kenangan Perjuangan Siliwangi*. Jakarta: CV Sandaan.
12. Jhon Tafbu Ritonga, *Marsipature Hutana Be: Pembangunan Desa Menuju Otonomi Daerah*. Jakarta: Pustaka Quantum, 2000.

13. Album Kenangan Perjuangan Siliwangi, Jakarta: Badan Pembina Corps Siliwangi Jakarta Raya, 1991.

14. Anthony Reid, *Menuju Sejarah Sumatra: Antara Indonesia dan Dunia*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011.

2. Kritik

Kritik Sumber atau dalam buku Kuntowijoyo disebut verifikasi ini adalah sebuah metode lanjutan dari heuristik dengan dua macam, yaitu kritik ekstren (keaslian sumber) dan kritik intren (dapat dipercayai) adapun penjelasan keduanya adalah sebagai berikut²⁰:

a. Kritik Ekstren

Kritik Ekstren adalah sebuah verifikasi dalam bidang keaslian dari sebuah sumber. Dalam kritik ini peneliti sejarah atau penyusun sejarah harus membuktikan keaslian dari data-data yang ia peroleh.

Kritik ekstren terhadap sumber tertulis diantaranya, Arsip “Naskah Rancangan Pola Dasar Pembangunan Daerah Propsi” oleh Panitia Perumus DPRD Prop Dati I SU ditulis dalam bahasa Indonesia, kertasnya berwarna kuning kecoklatan, diketik menggunakan mesin ketik lama dengan tinta berwarna hitam. dan Arsip Berkas Kumpulan Surat Keputusan Gubernur tentang Pengesahan Proyek Pembangunan Daerah TK I Sumatra Utara TA 1988/1989 ditulis dalam bahasa Indonesia, kertasnya berwarna kuning kecoklatan, diketik menggunakan mesin ketik lama dengan tinta berwarna

²⁰ Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah* (Yogyakarta: Penerbit Tiara Wacana, 2018).

hitam. Selain itu, Buku terbitan Harian Analisa Medan yang dipersembahkan kepada Gubernur Raja Inal Siregar, yaitu berjudul *Marsipature Hutana Be* merupakan kumpulan berita-berita mengenai Gerakan Marsipature Hutana Be sejak 1989 hingga 1990 yang ditulis oleh tim penerbit Harian Analisa Medan dan telah disunting oleh Sdr. Lokot Ray selaku Staf Humas Pemdasa sebelum disahkan dibawah nama Gubernur Raja Inal Siregar. Bukunya layak dibaca, sampulnya masih bagus, tintanya hitam jelas, kertasnya berwarna kuning kecoklatan, gaya bahasanya bisa dimengerti. Adapun sumber primer tertulis berupa dokumen atau data lain berada dalam kondisi fisik yang masih bagus, layak dan dapat dibaca, tahun penerbitannya sekitar sejak tahun 1989 hingga 2006.

b. Kritik Intern

Kritik Intern adalah sebuah verifikasi dalam bidang kredibilitas sebuah sumber. Kredibilitas atau kualitas sebuah sumber dapat dipercaya atau tidak harus diperhatikan. Oleh karena itu penyusun sejarah perlu melakukan kritik ini terhadap sumber-sumber yang telah ia kumpulkan. Pada tahapan ini, sumber-sumber primer dipercaya dapat dijamin kredibilitasnya karena dirasa layak sebab merupakan karya dari sang tokoh dalam tema pembahasan. Oleh karena itu, isi yang terkandung dalam sumber-sumber tersebut dalam dikatakan layak sebagai sumber data dalam penelitian ini. Dalam tahapan ini, penyusun telah menerapkannya pada setiap sumber yang telah ditemukan.

Sumber tertulis terdapat beberapa arsip dan dokumen diantaranya Arsip “Naskah Rancangan Pola Dasar Pembangunan Daerah Propsi” oleh Panitia Perumus DPRD Prop Dati I SU dan Arsip Berkas Kumpulan Surat Keputusan Gubernur tentang Pengesahan Proyek Pembangunan Daerah TK I Sumatra Utara TA 1988/1989 merupakan koleksi arsip Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Sumatra Utara, kedua arsip tersebut merupakan dokumen asli yang disimpan dalam koleksi arsip daerah Sumatra Utara.

Marsipature Hutanabe (Medan: Harian Analisa, 1990). Buku yang ditulis oleh Raja Inal Siregar tahun 1990 ini merupakan salah satu buku koleksi deposit daerah dinas perpustakaan dan arsip Provinsi Sumatra Utara. Sebagai sumber primer untuk penelitian ini, buku ini telah resmi sebagai dokumen daerah yang disimpan di perpustakaan Provinsi Sumatra Utara. Akses pada buku ini bisa didapatkan melalui diperpusip.sumutprov.go.id. Identitas sumber ini dapat dijamin keaslian dan kredibilitas sumber, Dimana Penerbit Harian Analisa selaku penerbit telah mengesahkan tulisan Raja Inal Siregar ini dalam dokumen buku yang diterbitkan tahun 1990.

Gubernur Sumatra dan Para Gubernur Sumatra Utara (Medan: Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Sumatra Utara, 2006). Ditulis oleh Muhammad Tok Wan Haria (Muhammad TWH) yang berupa buku kumpulan biografi para Gubernur Sumatra dan Sumatra Utara. Sumber ini berasal dari koleksi perpustakaan dan arsip Provinsi Sumatra Utara yang telah resmi dijadikan sebagai dokumen biografi para gubernur. Keaslian dan kredibilitasnya dapat dijamin dan dikatakan layak menjadi sumber primer

dalam penelitian ini, yaitu sebagai sumber biografi Raja Inal Siregar selaku pencetus Gerakan *Marsipature Hutana Be* di Sumut.

Album Kenangan Perjuangan Siliwangi (Jakarta: Badan Pembina Corps Siliwangi Jakarta Raya, 1991). Diterbitkan dikoleksi di dalalam perpustakaan dan arsip nasional Indonesia. Sebagai salah satu sumber yang memperlihatkan kontribusi Raja Inal Siregar untuk negara sebelum menjadi gubernur di Sumut. Sumber ini didapatkan dari situs online university of Michigan yang telah terbit versi digitalnya. Keaslian dan kredibilitasnya telah mampu mendukungnya menjadi salah satu sumber primer dalam penelitian ini.

Menuju Sejarah Sumatra: Antara Indonesia dan Dunia (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011). Ditulis oleh Anthony Reid sebagai sebuah tulisan yang menggambarkan potret sumatra zaman klasik hingga modern, diterbitkan pertama kali oleh KITLV dan NUS Publishing dengan judul asli *An Indonesian Frontier: Acehnese and Other Histories of Sumatra* tahun 2005. Sebagai sumber sekunder, penyusun mendapatkan sumber ini di toko buku Gramedia edisi terbitan Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Data dan asal sumber ini dapat dikatakan mampu menjadi sumber sebab keaslian dan kredibilitasnya telah terjamin.

3. Interpretasi

Penafsiran atau sering disebut sebagai diang subjektivitas ini mempunyai nama umum yaitu interpretasi. Sebagai tafsiran, metode ini digunakan untuk

mengetahui bagian benar atau salahnya dari sebuah sumber. Adapun metode ini mempunyai dua macam. Yaitu²¹:

- a. Analisis yang artinya menguraikan. Sumber yang dijadikan data sebageian besar mempunyai beberapa keungkinan yang harus ditafsirkan oleh penyusun sejarah atau peneliti sejarah.
- b. Sintesis, yang artinya menyatukan. Setelah menemukan berbagai data yang telah diverifikasi menggunakan metode kritik, penyusun harus menyatukan beberapa komponen dalam sumber tersebut agar menjadi data yang bersambung dalm menjelaskan sebuah peristiwa yang diteliti.

Pada tahap Interpretasi, penyusun memakai pendekatan ilmu sosial dan antropologi pembangunan untuk menguraikan kronologi peristiwa yang berkaitan dengan Gerakan *Marsipature Hutana Be* berdasarkan data dari sumber-sumber yang telah kritik pada tahap sebelumnya. Pendekatan melalui ilmu sosial membantu penyusun memahami gerakan Marsipature Hutana Be yang merupakan gerakan sosial yang tercipta di dalam masyarakat, sedangkan pendekatan ilmu antropologi membantu penyusun memahami sejarah pembangunan di Indonesia baik berupa pembangunan ekonomi dan daerah.

Setelahnya penyusun juga menyatukan beberapa komponen sebagai langkah sistesis dalam metode ketiga ini, yaitu menguraikan dan menyatukan fakta sejarah dari sumber-sumber telah dikumpulkan. Diantaranya:

²¹ Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah* (Yogyakarta: Penerbit Tiara Wacana, 2018)

- a. Lampiran Arsip Naskah Rancangan Pola Dasar Pembangunan Daerah Proprsu oleh Panitia Perumus DPRD Prop Dati I SU, Tahun 1988, dan Lampiran Arsip Berkas Kumpulan Surat Keputusan Gubernur tentang Pengesahan Proyek Pembangunan Daerah TK I Sumatra Utara TA 1988/1989 adalah dua sumber yang digunakan penyusun sebagai bagian dari arsip mengenai pembangunan desa di Provinsi Sumatra Utara pada tahun 1989.
- b. Buku Sejarah Kebangkitan Nasional Daerah Sumatra Utara dan Sejarah Pengaruh Pelita terhadap Kehidupan Masyarakat Pedesaan di Daerah Sumatra Utara adalah dua sumber yang digunakan penyusun untuk menjelaskan kronologi keadaan latar belakang Provinsi Sumatra Utara beserta masyarakatnya sebelum Gerakan *Marsipature Hutana Be* dijalankan dalam program pembangunan pedesaan di Sumatra Utara.
- c. Buku *Marsipature Hutanabe, Terobosan Membangun Desa: Marsipature Hutana Be dan Marsipature Hutana Be: Pembangunan Desa Menuju Otonomi Daerah* adalah tiga karya yang ditulis sebagai dokumen atau catatan sejarah mengenai Gerakan *Marsipature Hutana Be* di Provinsi Sumatra Utara. Kedua karya ini merupakan sumber utama yang membimbing penyusun memahami identitas Gerakan *Marsipature Hutana Be*, kronologi dan pengaruhnya di masyarakat sumut pada tahun 1989-1998.
- d. Album Kenangan Perjuangan Siliwangi (Jakarta: Badan Pembina Corps Siliwangi Jakarta Raya, 1991), Gubernur Sumatra dan Para Gubernur

Sumatra Utara (Medan: Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Sumatra Utara, 2006), dan Profil Anggota Dewan Perwakilan Daerah 2004-2009 (Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR dan International IDEA, 2004). Ketiga sumber ini merupakan sumber yang menjelaskan biografi, riwayat hidup serta pencapaian Raja Inal Siregar selaku pencetus Gerakan *Marsipature Hutana Be* sebelum atau kala menjabat sebagai Gubernur Provinsi Sumut.

- e. Media Sidang Umum MPR RI: 1-11 Maret 1998 Edisi Pertama (Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR-RI, 1998) dan Menuju Sejarah Sumatra: Antara Indonesia dan Dunia (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011) sebagai sumber yang menjelaskan latar belakang tempat kejadian peristiwa yang sedang diteliti yaitu gambaran sejarah pulau sumatra, data tersebut diperlukan dalam penelitian ini, mengingat Raja Inal Siregar sendiri adalah abdi negara yang berasal dari Sumatra Utara. Oleh karena itu dalam meneliti latar belakang tempat tinggal serta kelahiran sang tokoh, buku ini perlu dijadikan sumber sekunder yang mampu melengkapi penjelasan mengenai latar belakang kondisi pulau sumatra, serta gambaran kondisi politik pada tahun 1990-an.

4. Historiografi

Menurut Louis Gottschalk historiografi itu sendiri adalah rekonstruksi yang imajinatif dari masa lalu dengan menjadikan data-data yang diperoleh sebagai

dasar, dalam prosesnya penyusunan sejarah ini akan menempuh metode penelitian sejarah dalam bentuk tulisan yang sintesis²².

Pengertian historiografi lainnya dari sejarawan berbangsa Indonesia Kuntowijoyo adalah sebagai metode penyusunan sejarah adalah metode yang di dalamnya aspek kronologi adalah yang paling penting²³. Dalam penelitian yang menjadikan seni kaligrafi sebagai objek, maka penyusun memulai penyusunan dari sejarah asal-usul hingga perkembangannya di zaman sekarang. Adapun dalam penyusunan penelitian ini, penyusun menyajikannya dalam bentuk tulisan yang dibagi menjadi tiga bagian, dari pengantar, hasil penelitian atau bab pembahasan dan yang terakhir adalah simpulan atau penutup.

Bab I berupa pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah sebagai penjabar latar belakang pengangkatan judul makalah yang diteliti; rumusan masalah, yang dibuat untuk menentukan poin-poin masalah yang akan menjadi pacuan pengembangan penyusunan makalah; selanjutnya terdapat tujuan penyusunan yang menjawab masalah-masalah yang terdapat dalam rumusan masalah; kajian pustaka sebagai acuan penyusun untuk menyusun serta menjadi pembandingan dengan karya-karya lainnya yang memiliki tema yang sama; dan yang terakhir adalah metode penelitian, proses atau langkah yang dilakukan penyusun dalam meneliti sejarah pemikiran.

Bab II Marsipature Hutana Be di Provinsi Sumatera Utara, adapun didalamnya terdapat asal usul istilah Marsipature Hutana Be, latar belakang

²² Louis Gottschalk, *Mengerti Sejarah* (Jakarta: UI-Press, 1995).

²³ Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah* (Yogyakarta: Penerbit Tiara Wacana, 2018).

pembentukan Gerakan Marsipature Hutana Be, dan hubungan Gerakan Marsipature Hutana Be dengan Syariat Islam.

Bab III Kontribusi Marsipature Hutana Be dalam Pembangunan Pedesaan di Provinsi Sumatra Utara, berupa pokok dari isi penelitian dalam tulisan, yaitu Kontribusi Marsipature Hutana Be di Provinsi Sumatra terhadap pembangunan pedesaan di Sumatra Utara dalam berbagai bidang, diantaranya bidang pendidikan, ekonomi, sosial-*culture*, politik, dan teknologi.

Bab IV sebagai bab penutup berisi tentang kesimpulan yang menyimpulkan hasil dari penelitian Kontribusi Marsipature Hutana Be terhadap pembangunan desa di Provinsi Sumatra Utara 1989-1998 serta saran.

